

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8  
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN  
BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**MUHAMMAD RIOMADI**  
**157310312**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Penelitian ini yang berjudul : “ Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis” Penulis menyadari bahwa dalam Proses Studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Penelitian ini banyak pihak yang turut membantu sehubungan dengan itu, Secara khusus pada lembaran ini penulisan mengucapkan salud dan Ribuan Terimakasih Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syahfrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.SI. yang menyediakan Fasilitas dan Memberikan Kesempatan kepada penulis daam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau Pimpin.
3. Bpak Budi Mulianto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Jajaran Dosen Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Si , selaku Pembimbing I saya, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan berusaha semaksimal mungkin mungkin dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan benar hingga layak diseminarkan.
6. Seluruh Staff/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai Keperluan Administrasi yang berkaitan dengan Perkuliahan.
7. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/ Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan penelitian.
8. Terimakasih kepada Dinas Lingkungan Hidup atas Kemudahan yang telah di berikan kepada Penulis selama melakukan Pengumpulan Data yang di butuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Persembahan ini di berikan terutama untuk kedua Orang Tua, Ibuku Mujiati Dan Ayahku Drs. Tarmadi yang telah bekerja keras berdoa dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya dari apapun

10. Terimakasih Kepada Keluarga Besar dan Kerabat Penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang ALLAH SWT.

11. Terimakasih Kepada Senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah sudi meluangkan waktu nya untuk membantu saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini , semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan ALLAH SWT.

12. Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas F angkatan 2015 yang telah mendukung dalam kebersamaan yang penuh keceriaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelamaan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis ini dimasa yang akan datang. Seomoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi diamal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal alami...

Wassalamulaikum Wr,Wb

**Penulis**

**Ttd**

**Muhammad Riomadi**

## DAFAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Pemeritah.....	11
2. Pemerintahan.....	12
3. Kebijakan .....	15
4. Implementasi kebijakan .....	19
5. Manajemen Pemerintahan.....	20
A. Pengertian Manajemen Pemerintahan.....	20
B. Manajemen Sumber Daya Manusia .....	20
6. Pengelolaan .....	22
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Pikir .....	27
D. Konsep Operasional .....	28
E. Operasional Varabel.....	30
F. Teknik Pengukuran .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	36

B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Teknik Penarikan Sampel .....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	41
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	42

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis .....	44
1. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis.....	44
2. Keadaan penduduk Kabupaten Bengkalis.....	45
B. Profil Kecamatan Bantan .....	45
1. Keadaan Geografis Kecamatan Bantan.....	45
2. Pemerintahan Kecamatan Bantan .....	47
3. Gambaran Perekonomian Kecamatan Bantan .....	47
C. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.....	47

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	53
1. Tingkat Pendidikan .....	53
2. Jenis Kelamin .....	54
3. Tingkat Umur .....	55
B. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis .....	55
1. Komunikasi .....	56
2. Sumber Daya.....	58
3. Disposisi.....	60
4. Struktur Birokrasi .....	63
C. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis.....	67

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

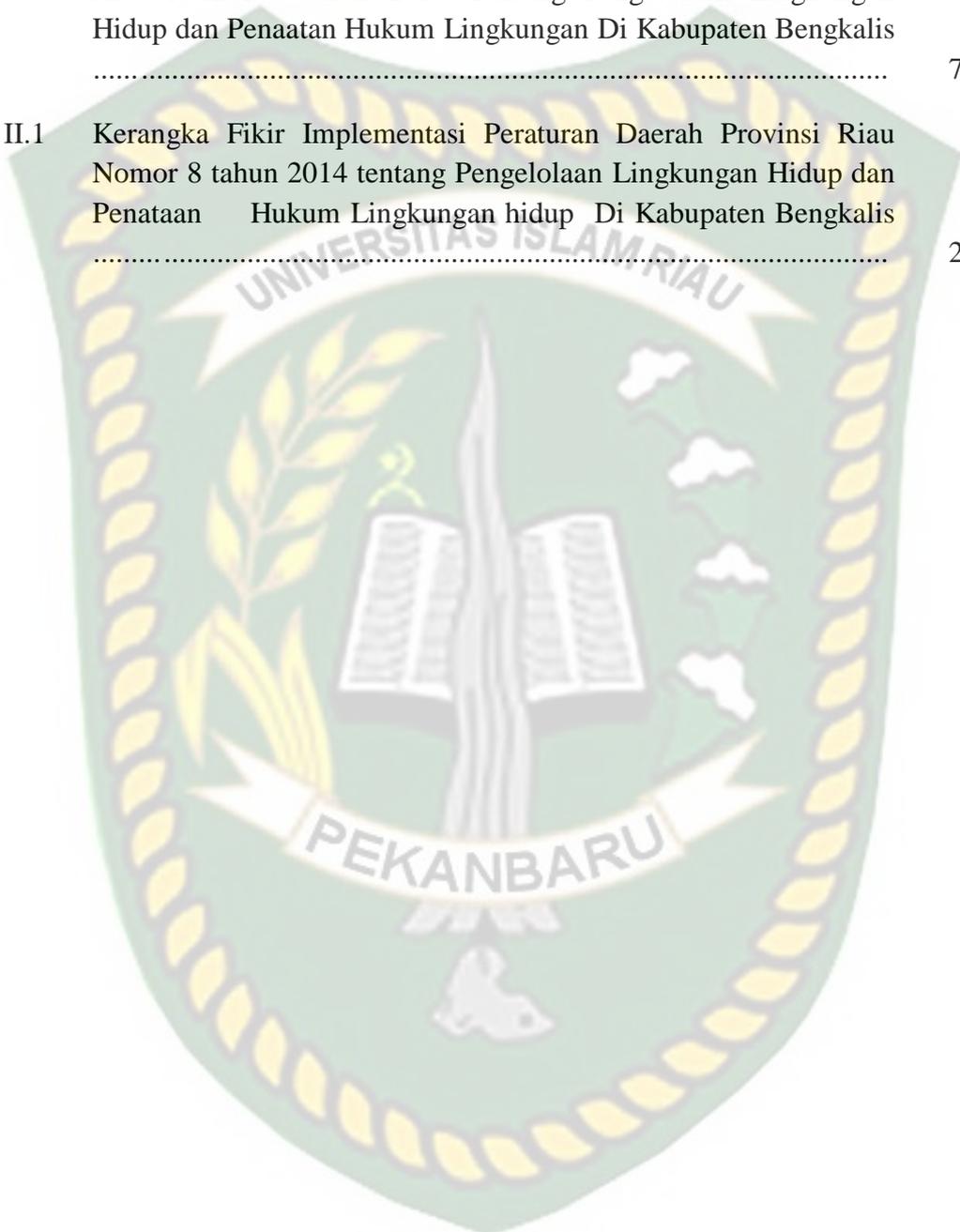
## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Kecamatan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis .....	2
I.2 Kerusakan Hutan Mangrove Di Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan .....	3
I.3 Data Pemantauan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis.....	4
I.4 Data kegiatan sosialisasi yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.....	5
II.1 Penelitian Terdahulu.....	25
II.2 Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis.....	30
III.1 Populasi Dan Sampel Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Di kabupaten Bengkalis.....	37
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkalis.....	41
IV.1 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Bantan .....	46
V.1 Indentitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat Pendidikan.....	54
V.2 Distribusi Responden Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin.....	54
V.3 Distribusi Responden Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Menurut Usia.....	55
V.4 Distribusi Jawaban responden mengenai indikator komunikasi .....	56

V.5	Analisis Distribusi Jawaban responden mengenai indikator 7komunikasi .....	57
V.6	Distribusi Jawaban Responden mengenai indikator Sumber Daya.	59
V.7	Analisis Distribusi Jawaban Responden Terhadap indikator Sumber daya .....	60
V.8	Distribusi Jawaban Responden Mengenai indikator Disposisi .....	61
V.9	Analisis Distribusi Jawaban Responden Terhadap indikator Disposisi .....	62
V.10	Distribusi Jawaban responden terhadap indikator Struktur Birokrasi .....	64
V.11	Analisis Distribusi Jawaban responden terhadap indikator Struktur Birokrasi .....	65
V.12	Rekapitulasi jawaban responden mengenai Implemetasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Di kabupaten Bengkalis.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Diagram Alirnya Aplikasi turunan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Di Kabupaten Bengkalis .....	7
II.1 Kerangka Fikir Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan hidup Di Kabupaten Bengkalis .....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Qusioner Penelitian .....	73
Lampiran 2 : Wawancara Penelitian .....	83
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa .....	87
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	88
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis .....	89
Lampiran 6 : Surat Keterangan Bahwa Telah Melakukan Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis .....	90
Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian .....	91

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Riomadi  
NPM : 157310312  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis.

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat pada dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri ( tidak karya plagiat ) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah dan metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, Keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan susai dengan ketentuan Fakultas dan universitas serta hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Pelaku Pernyataan

Muhammad Riomadi

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8  
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN  
BENGKALIS**

**ABSTRAK**

**Muhammad Riomadi**

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat Pengelola Hutan Mangrove

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan Dasar aturan terkait dengan kerusakan lingkungan Hutan Mangrove yang terjadi di Kecamatan Bantan dan juga mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif, penulisan ini menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan dilapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis berkaitan dengan Kerusakan Hutan Mangrove, dengan Kuisioner dan Wawancara sebagai alat pengumpulan Data, dan Data yang di kumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 5 kelompok menjadi objek dalam penelitian .penulisan terdiri dari Data Primer yang mana diperoleh melalui alat penelitian berupa kuisioner, dan Daftar Wawancara, Serta Data Sekunder yang diperoleh dengan alat bantu tabel frekuensi sesuai dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu penanggulangan Kerusakan Hutan mangrove Di Kabupaten Bengkalis Dikategorikan Baik / Terimplementasi, Tetapi dimana masih juga terdapat Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menaati Aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PROVINCE  
RIAU NUMBER 8 OF 2014 CONCERNING MANAGEMENT OF  
ENVIRONMENTAL AND ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL LAW  
IN BENGKALIS DISTRICT**

**ABSTRACT**

**Muhammad Riomadi**

**Keywords** : Implementation, Policy, Management of the environment, Community of mangrove management

The purpose of this study is to describe the implementation of the basic rules relating to environmental damage to mangrove forests that occur in Bantan sub-district and also describe the obstacles in its implementation. This study uses the Quantative method with Descriptive Analysis Techniques, this paper describes the conditions in the objects found in the field based on data data relating to problems that exist in Bengkalis Regency relating to Mangrove Forest Damage, with Questionnaires and Interviews as Data collection tools, and Data collected then presented as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of existence and research objectives in the studied location. There were 5 groups as objects in the writing study consisting of Primary Data which were obtained through research tools in the form of questionnaires, and Interview Lists, and Secondary Data obtained by means of frequency tables in accordance with the results of the study concluded that mangrove forest damage was treated in Bengkalis Regency Categorized Good / Implemented, But where there is still a Lack of Public Awareness in Complying with the Rules that have been made by the Government

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Terbentuknya Negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta di bagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan konkuren, dan umum, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada urusan konkuren yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan Dasar yaitu Lingkungan Hidup

Bengkalis adalah Kabupaten di provinsi Riau yang wilayahnya mencakup daratan timur pulau sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas 7.793,93 km<sup>2</sup>. Ibu kota berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Oleh karena itu wilayah ini di apit oleh selat dan berhadapan langsung dengan lautan yang mana sangat di khawatirkan beberapa wilayah pesisir terancam terkena bencana abrasi oleh air laut dan jika kelestarian hutan bakau tidak di jaga dan turap sebagai penahan gelombang air laut turut di perhatikan.

**Tabel I. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		
		Pria	Wanita	Jumlah total
1	Mandau	123.665	115.848	239.513
2	Pinggir	44.490	42.045	86.535
3	Bukit Batu	16.727	16.113	32.840
4	Siak Kecil	10.419	9.801	20.220
5	Rupat	16.982	16.081	33.063
6	Rupat Utara	7.303	6.898	14.201
7	Bengkalis	39.876	38.695	78.571
8	Bantan	19.793	19.251	39.044
9	Batin Solapn	-	-	-
10	Bandar Laksamana	-	-	-
11	Talang Muandau	-	-	-
Jumlah/total		279.255	264.732	543.987

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis 2017

Kabupaten bengkalis tepatnya kecamatan bantan masalah kerusakan hutan mangrove sudah memerlukan perhatian khusus dari Pemerintahan Kabupaten Bengkalis ,karena hutan bakau di kecamatan bantan kian memprihatinkan karena beberapa hal seperti pembabatan liar dan alih fungsi dari hutan mangrove tersebut, status Hutan magrove yang dimaksud penelti adalah hutan mangrove dalam kawasan perlindungan pemerintah daerah kabupaten bengkalis ,masalah kelestarian lingkungan sudah di atur pada Pasal 3 dala Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 Yaitu Melindungi Daerah dari pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Kondisi hutan bakau di kecamatan bantan kabupaten bengkalis sangat mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya pembabatan secara liar dan pengalih fungsian menjadi tambak perikanan. Dalam hal ini dapat pula merusak lingkungan hidup dan juga karena rusaknya hutan bakau dapat juga mempercepat terjadinya erosi pantai.

Untuk melihat kerusakan hutan mangrove yang ada di kabupaten bengkalis, dapat di lihat dari berikut :

**Tabel I.2 Kerusakan Hutan Mangrove Di Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan**

NO	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Kerusakan ( Ha)
1	Rupat Utara	12,784	25,3
2	Rupat	5,806	1,5
3	Bantan	5,584	20,7
4	Bengkalis	4,258	0,5
5	Mandau	6,721	3
6	Pinggir	2,215	5,3
7	Siak Kecil	3,452	7,8
8	Bukit Batu	898	7,8
<b>Jumlah</b>		<b>41,718</b>	<b>64,1</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Dalam pelaksanaannya, masalah kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Daerah Kabupaten Bengkalis dari 8 kecamatan yang ada kecamatan Rupat Utara dengan Luas Kerusakan mencapai 25,3 Ha, kemudian dengan kerusakan Lahan Mangrove yang terbesar kedua yaitu di Kecamatan Bantan dengan Luas kerusakan yaitu 20,7 Ha . Hal ini mencerminkan besarnya kerusakan lahan mangrove yang ada di Bengkalis yang memerlukan penanganan secara khusus dari Pemda setempat untuk sigap dalam melakukan penanganan terkait Kerusakan Hutan bakau ini.

Dalam hal ini penanggulangan kerusakan hutan mangrove terkait pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Dasar aturan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Instansi yang terkait yang menjalankan tugas dan fungsi dalam penanggulangan kerusakan hutan bakau ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan salah satu tugas dari OPD tersebut dalam menanggulangi kerusakan Lahan bakau sifatnya berupa pembinaan terhadap masyarakat, kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan pembibitan, proses penanaman, hingga proses pemeliharaan.

Setiap adanya peraturan yang ditetapkan pasti adanya sebuah sanksi, sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pada pasal 58 adalah berupa ketentuan pidana yang terletak di pasal 119 undang undang Lingkungan Hidup. Hukuman tersebut berupa ancaman pidana kurungan maksimal tiga tahun penjara dan ganti rugi uang maksimal Rp. 3.000.000.000,00.

yang menjadi hubungan antara Lingkungan Hidup dengan Dasar Aturan yang penulis gunakan yaitu Dasar aturan ini mengatur semua yang terkait di dalam lingkungan hidup hal ini selaras dengan masalah yang diangkat oleh penulis terkait dengan kerusakan hutan mangrove bahwasannya kerusakan hutan mangrove termasuk kedalam kerusakan ekosistem yang mana ekosistem ini masuk kedalam ruang lingkup dari Lingkungan Hidup.

**Tabel I.3 Data Pemantauan Dan Pembinaan Kelompok Masyarakat  
Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Jenis Kelompok	Ketua Anggota	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bantan	Teluk pepal	Gapoktan paguyuban rukun iii	Pelestarian mangrove	Bejan	35 orang
2	Bantan	Mentayan	Pkk/kwt siata	Pelestarian mangrove	Puji astute	37 orang
3	Bantan	Mentayan	Gapoktan	Pelestarian mangrove	M.jalil	-
4	Bengkalis	Air putih	Keslimas	Pelestarian mangrove	Turadi	-
5	Bengkalis	Kelapapati	Paret sengahagah	Pelestarian mangrove	Syamsul bahri	10 orang
6	Bengkalis	Pangkalan batang	Lsm hijau lestari	Pelestarian mangrove	Edi	5 orang
7	Bengkalis	Pangkalan batang	Kenservasi mangrove hijau	Pelestarian mangrove	Sapriden	8 orang
8	Rupat utara	Tanjungpunak	Harapan baru	Pelestarian mangrove	Asril	15 orang
9	Rupat utara	Tanjung rhu	Mulia bersatu	Pelestarian mangrove	Yakup	10 orang
10	Mandau	Gajah sakti	Mulya 1	Pertanian	Hardiman	17 orang
12	Mandau	Gajah sakti	Usaha bersama	Pertanian	Tanrem rahayu	15 orang
13	Bukit batu	Api-api	Mangrove pesisir	Pelestarian mangrove	M.syarif	8 orang
14	Bukit batu	Dimpas	Lestari	Pelestarian mangrove	Zamri	10 orang

*sumber :Dinas lingkungan Hidup Kabupaten bengkalis,2017*

Kumpulan masyarakat pengelola hutan bakau tersebut di berikan sosialisasi yang didalamnya berisikan bekal pembinaan tentang pentingnya hutan bakau yang

terletak pesisir pantai. bantuan sarana juga di berikan dalam menunjang semangat kerja masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap Sumber daya Alam (SDA) lingkungan pesisir

**Tabel I.4 Data kegiatan sosialisasi yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis**

NO	Tahun	Kecamatan dan desa	Nama kelompok	Waktu sosialisasi	Tempat	Materi sosialisasi
1	2015	-	-	-	-	-
2	2016	-	-	-	-	-
3	2017	Bantan Air	Kelompok jaya	05-06 febuari 2017	Aula Kantor Kepala desa Bantan air	Pengelola an hutan mangrove
		Pambang	Belukap	05-06 febuari 2017	Aula Kantor Kepala Desa Bantan Air	Pengelola an hutan mangrove

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Salah satu kegiatan dari program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yaitu adanya pembinaan berupa sosialisasi kepada kelompok kelompok masyarkat pengelola hutan mangrove yang ada di kecamatan bantan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya hutan bakau bagi ekosistem lingkungan hidup . karena jika kerusakan lahan hutan bakau terus terjadi akan mempunyai dampak berupa menyempitnya luas lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai, lalu berkurangnya tempat berkembang biak ikan perairan pantai karena berkurangnya hutan bakau.

Terlebih di dalam dasar aturan ini pada pasal 6 ayat (2) Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- A. Pencegahan;
- B. Penanggulangan;
- C. Pemulihan;
- D. Pemeliharaan.

**Gambar I.1 Diagram Alir Aplikasi Turunan dari Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove yang ada Di Kecamatan Bantan**



Sesuai dengan Dasar Aturan yang digunakan penulis bahwa berkaitan dengan kerusakan hutan mangrove ini merupakan kewenangan yang harus di jalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun melihat kenyataan di lapangan penulis beranggapan bahwa hasil dari program yang di lakukan dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan baik hal ini selaras dengan fenomena fenomena yang ada seperti :

1. Beberapa program telah di lakukan oleh dinas lingkungan hidup seperti dilakukannya penanaman bibit pohon mangrove di selurus sekitaran pesisir pulang bengkalis dan tepatnya di kecamatan bantan, dan juga telah di lakukannya sosialisasi secara intensif di beberapa desa yang mengalami kerusakan hutan mangrove tetapi kerusakan hutan mangrove di kecamatan bantan kabupaten Bengkalis tetap terjadi.
2. Kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh dinas terkait terhadap beberapa program yang di jalankan sehingga kerusakan tersebut tetap terjadi.

Sehubungan dengan permasalahan yang ada di atas melalui pengamatan awal yang di lakukan oleh penulis dan untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana implementasi peraturan daerah ini berjalan, sehingga peneliti menggarap penelitian dengan judul : “ **Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan hidup di kabupaten Bengkalis** “

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa terdapat beberapa masalah berupa kerusakan hutan mangrove di kecamatan bantan kabupaten bengkalis yang di karenakan berbagai faktor yang telah di jelaskan di latar belakang menjadi tanggung jawab penuh pemerintahan kabupaten bengkalis untuk menanggulangi masalah tersebut.berdasarkan penjelasan tersebut,oleh karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni :“ **Implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di kabupaten bengkalis?.**”

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- A. menjelaskan langkah yang dilakukan Pemerintah daerah Bengkalis dalam Penanggulangan kerusakan hutan mangrove melalui implementasi Peraturan daerah provinsi di kabupaten Bengkalis.
- B. Penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam implementasi pemerintah kabupaten bengkalis dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove

### **2. Kegunaan Penelitian**

- A. Secara akademik, Penelitian ini di harapkan menjadi bahan perbandingan terhadap peneliti yang ingin mengangkat permasalahan yang sama

- B. Sebagai petunjuk dan pembeda bagi penulis lainnya yang berkeinginan meneliti masalah ini lebih lanjut tentang permasalahan yang sama.
- C. Untuk penulis melengkapi persyaratan tugas akhir perkuliahan serta menambah ilmu



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis” Maka peneliti akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, adapun di dalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah sebagai kerangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut, antara lain :

#### **1. Pemerintah**

##### **a. Pengertian**

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka diperlukan teori atau pengertian dari pemerintah dan pemerintahan agar mempermudah untuk memperoleh hasil hasil yang objektif, untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian pemerintah dan pemerintahan itu sendiri.

Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki perbedaan makna. Pemerintahan berhubungan dengan tugas dan kewenangan, pemerintah menyangkut aparat yang menjalankan tugas dan kewenangan tersebut. menurut Mustafa (2014;87-88) kata pemerintah dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu mencakup dua lembaga. Sedangkan

pemerintah dalam arti luas mencakup 4 lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Auditif.

Menurut Alpeldeore (dalam Supriyanto, 2009;22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai kesatuan semua lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dalam arti luas terdiri dari badan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang disebut sebagai penguasa.
2. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang berkuasa memerintah di suatu Negara. dalam hal ini presiden, perdana menteri, dan lain-lain
3. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif, dalam artian kepala Negara bersama-sama dengan mentrinya.

## **2. Pemerintahan**

### **a. Pengertian**

Maulidiah (2014;1-2) Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsure utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan

Bevir (dalam Wasistiono dan Simangunsong, 2015;87) menyebutkan bahwa Memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah Yunani : kubernan),

mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (government as institution), sedangkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses (government as a process). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai proses atau aktivitas memerintah.

Sedangkan menurut Santosa (dalam Iestari, 2004:21) tugas tugas pemerintahan antara lain:

a. Melakukan pembangunan

Masalah ini sesungguhnya harus dibagi kedalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, dan manajemen pemerintahan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Dalam hal ini pemerintahan sebagai wadah pemerintahan yang menunjukkan tupoksi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

c. Memberikan pelayanan public

Dalam menjalankan TUPOKSInya pemerintahan sebagai pelayan masyarakat, maka diperlukan adanya aparat yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

Sejalan dengan hal diatas ,dapat juga di jelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3 (tiga) adalah :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan,dan.
- c. Fungsi pelayanan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dan penyelenggaraan tersebut sekalin pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yan ada.

Sedangkan Ndraha (2003;7) mendefinisikan pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerinta bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan yang di perintah akan jasa sipil dan layanan, dalam hubungan pemerintahan.

Selama ini pemerintahan dijalankan belum dilaksanakannya secara maksimal,dikarenakan kinerja aparat masih lemah ,secara subjektif,menrut Rasyid (197;48),tugs pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan
- b. Pemberdayaan
- c. Pembangunan

Pemerintahan agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya , di antara dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, Negara di harapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Negara yang di capai.

### **3. Kebijakan**

#### **a. Pengertian**

Menurut Dunn (2001;105) menjelaskan kebijakan adalah suatu informasi yang sesuai dengan kebijakan untuk di manfaatkan dalam rangka pemecah sebuah persoalan.

Kebijakan publik merupakan ketetapan yang dibentuk oleh Negara , sebagai strategi untuk menjalankan tujuan Negara yang bersangkutan ( Nugroho,2008;55). Dari hal tersebut di ketahui bahwa kebijakan public di kelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebijakan macro
- b. Kebijakan messo
- c. Kebijakan mikro

Selanjutnya istilah public dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi ; pemerintah ,masyarakat dan umum (abiding,2002;10). Sedangkan menurut Nugroho(2006;25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan public , bukan kehidupan seorang atau golongan.

Membahas teori kebijaksanaan Negara dan administrasi pembangunan Ermaya (1994;117), tidak bias lepas dari administrasi yang mencakup proses pencapaian tujuan dan sasaran , aturan- aturan atau cara-cara melalui kebijaksanaan atau program yang bersifat menyeluruh dan terkait dengan kepentingan tertentu.

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho (2008;115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan public yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Nugroho ( 2008;149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai enam kategori antara lain :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Kelayakan

Kebijakan publik adalah usaha yang didasari akan pengetahuan secara rasional untuk mencapai suatu tujuan di antaranya adalah untuk menciptakan keadilan,efisiensi,keamanan,kebebasan,serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri ( stone,dalam Edi Wibowo dkk,2003;30)

Diantaraya dapat dikutip pendapat sheema dan shabber dalam (syaukani,2007;33) dengan desentralisasi fungsi dan penugasan pejabat di daerah maka tingkat pemahaman serta sensitivitas akan kubutuhkan masyarakat daerah akan meningkat,kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan

masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memilih informasi yang lebih baik dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang akan lebih realitas dari pemerintah.

Selanjutnya sheema dan shabber(dalam,syukani,2007;34) yang mengatakan struktur pemerintah yang di desentralisasikan di perlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan implementasi kebijakan.

Untuk membuat sebuah kebijakan public ,terlenih dahulu di lakukan analisis kebijakan.Menurut Paton dari Saavicky (1993;23) dalam Suharsono Riant (2003;84) analisis kebijakan adalah tindakan yang di perlukan untuk di buatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru maupun kebijakan yang baru sebagai konsekuensi yang ada.

Selanjutnya Dunn dalam Riant(2003;86) menyatakan analisis kebijakan adalah perumusan kebijakan.menganalisa faktor pendukung kebijakan, implementasinya, peluan evauasi , dari kondisi lingkungan kebijakan.

Menurut Dunn (2001;105) Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna di manfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecah suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang di lakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pumbuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternative-alternatif, merupakan penelitian yang di peroleh dari beberapa usulan yang ada
3. Penerapan sarana keputusan,menggunakanberbagai potensi yang di miliki oleh badan /instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan ,melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan

Kebijakan public adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho,2008;55)

Dari hal tersebut di ketahui bahwa kebijakan public di kelompokkan menjadi tiga yaitu : (Nugroho,2008;62)

1. kebijakan public yang bersifat macro atau umum
2. kebijakan public yang bersifat messo atau menengah
3. kebijakan public yang bersifat mikro

selanjutnya istilah public dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga kondisi : pemerintah, masyarakat, dan umum. Sedangkan menurut Nugroho (2006;25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan public, bukan kehidupan seorang atau golongan. Membahas teori kebijaksanaan Negara dan administrasi pembangunan (Ermaya,1994;117), tidak bias lepas dari administrasi yang mencakup proses pencapaian tujuan dan sasaran , aturan-aturan atau cara-cara melalui kebijaksanaan atau program yang bersifat menyeluruh dan terkait dengan keputusan tertentu.

Charles O Jones (2004;12) dalam bukunya Public Policy menjelaskan program adalah cara yang sahkan untuk mencapai tujuan ,kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang lurus di dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang di perlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu program ini biasanya di jabarkan atau di rinci dalam sebuah proyek-proyek dan di dukung oleh anggaran.

Ada tiga hal yang harus dilakukan suatu program di antaranya (Charles O jones,2004;12)

- a. langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Urutan atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
- c. Urutan serta pengaturan langkah

Namun sebaik apapun program tanpa ada implementasi ( pelaksanaan) meustahil sasaran dan tujuan-tujuan yang di kehendaki dapat tercapai. Implementasi berarti penerapan pelaksanaan , karena itu implementasi kebijakan berupa program merupakan aspek yang dari keseluruhan kebijakan.

#### **4. Implementasi kebijakan**

##### **a. Pengertian**

Selanjutnya Goerge C.Edward III (dalam sujianto,2008;15) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses ? untuk itu perlu di pertimbangkan 4 faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik , yaitu :

1. Komunikasi  
Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijkan) dengan para kelompok sasaran
2. Sumber Daya  
Merupakan salah satu faktor pentingdalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan ( telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi ) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai,maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.
3. Sikap ( Disposisi)

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi

#### 4. Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan karakter dari Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan membuat berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implemtasi suatu program dapat di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

### 5. Manajemen Pemerintahan

#### a. Pengertian

Menurut Prajudi ( syafie, 2005;268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyesuaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

#### b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bias di kelompokkan atas 2 macam yaitu :

1. Sumber daya manusia
2. Sumber daya Non-Manusia

Manajemen Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan,2012;10)

Setiap orang memiliki peran dalam sebuah lembaga karena didalamnya terdapat perencanaan dan tujuan dalam mewujudkan terget sebuah organisasi bila di uraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong Sumber daya Manusia yang ada untuk saling bekerja sebagai patner dalam mencapai kesuksesan organisasi dimasa sekarang dan di masa yang akan datang.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh factor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia(siswanto,2011:7)

Menurut Flippo (dalam handoko 1995;6) manajemen Sumber daya Manusia yaitu : perencanaan ,pengerahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,pengembangan, pemberian kompensasi,pengintergrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu,organisasi dan msyarakat.

Menurut salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintahan untuk mengelola Negara agar tercapat ketetapan,kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen Pemerintahan Daerah Di Indonesia di landasi

oleh Undang -Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas,nyata dan bertanggung jawab , hal ini di perkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan,pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **6. Konsep Pengelolaan**

Menurut Soekanto pengelolaan adalah proses yang di mulai dari proses perencanaan ,pengeturan,pengawasan , penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Kemudian prajudi mengatakan pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

### **a. Pengertian**

Kamus besar bahasa Indonesia (1997) kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang artinya mengurus sesuatu bidang usaha “(peusahaan,pertanian dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti dari pengelolaan itu sendiri adalah proses , cara pembuatan mengelola : proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain : proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi : proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tujuan.

Harsono (1997;121) pengelolaam sampah adalah sesautu istilah yang berasal dari kata“ kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk

menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Hamalik (dalam Adisasmita 2011;21) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Moekjat(dalam Adisasmita 2011;21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menemukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber – sumber lain.

Menurut Pamuji pengelolaan menitik beratkan pada dua faktor penting, yaitu:

1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan.

## **7. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **a. Pengertian**

Dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 dirumuskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan Hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya dapat menjaga dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki kesadaran akan kepentingan lingkungan Hidup sebagai penyeimbang kehidupan.

Masalah lingkungan di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah lingkungan di Negara maju atau industry. masalah lingkungan di Negara maju disebabkan oleh pencemaraan sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energy , teknologi maju yang boros energy pada industry, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan, selain itu juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga akibat tekanan kepadatan penduduk yang di sertai dengan masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan Hidup.

Beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa Lingkungan Hidup merupakan suatu lingkungan organism yang memiliki proses perkembangan untuk membentuk kepribadian seseorang, proses perkembangan juga dapat di lakukan oleh keluarga, sekolah, teman bermain, dan masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa teori yang dipakai dalam nya.dari hasil perbandingan terhadap sumber terdahulu penulis belum menemukan persoalan yang sama terkait dengan apa yg di buat oleh penulis akan tetapi penulis mengambil beberapa bahan panduan untuk lebih bisa mengembangkan penelitian yang di teliti penulis

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

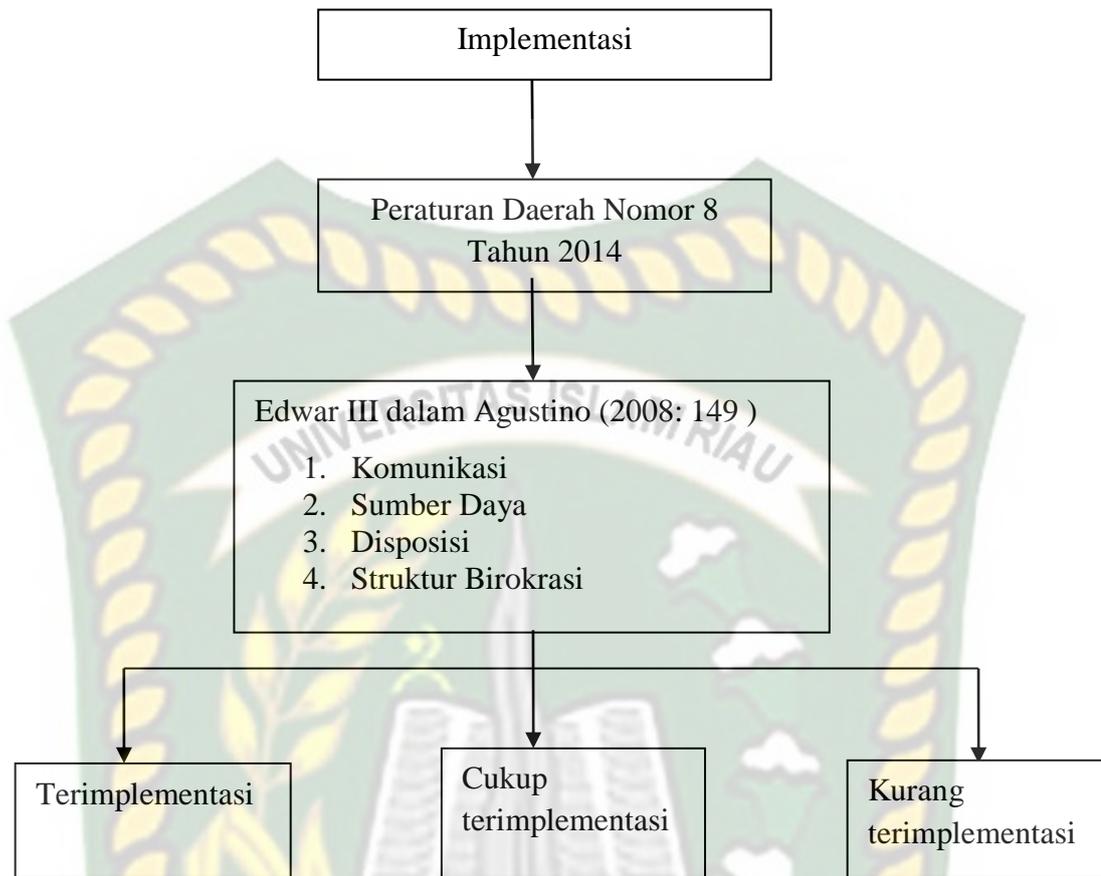
No (1)	Nama Peneliti (2)	Judul (3)	Tipe Penelitian (4)
1	MUHAMAD FADHLAN 061233310038	Pengaruh Aktivitas Ekonomi Penduduk Terhadap Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove Di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan	Menggunakan Metode Kuantitatif dengan tipe penelitian survei
2	RAHMAN 35108044	Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove Di Desa Dongko Kecamatan Dempal Selatan Kabupaten ToliToli	Menggunakan Metode Kuantitatif dengan tipe penelitian survei
3	SETIA FAJAR MAULANA 137310506	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	Menggunakan Metode Kuantitatif dengan Tipe penelitian Deskriptif

### **C. Kerangka pikir**

Berdasarkan aturan terkait dengan abrasi, masalah tersebut merupakan proses pengikisan pantai oleh air laut dan lajunya arus laut yang bersifat merusak yang disebabkan karena rusaknya lingkungan alam daerah pantai tersebut. Air laut tidak pernah diam dan bergelombang di permukaannya, terkadang besar dan kecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besar gelombangnya. Air laut mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Yang dapat mengakibatkan pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan terjal. Namun kerusakan yang terjadi dikarenakan abrasi bisa diperkecil dengan cara tetap menjaga kelestarian hutan mangrove di sekitar pantai.

Namun demikian, kerusakan pantai semakin besar karena dengan berjalannya waktu. Hutan-hutan mangrove yang dulunya menghiasi pesisir pantai, hal ini selaras yang terjadi di kabupaten Bengkalis tepatnya di pulau Bengkalis yang mana di daerah pesisir pantainya semakin mengawatirkan di karenakan terjadinya abrasi secara terus menerus yang dalam hal ini sangat dapat mengancam kehidupan masyarakat yang mana lokasi pesisir Bengkalis sepanjang 60 km terkena dampak abrasi parah, salah satunya memperkirakan kecepatan abrasi hingga 25 meter per tahun.

**Gambar II.2 Kerangka Fikir Penelitian**



**Sumber : Penelitian Terdahulu**

#### **D. Konsep Operasional**

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian akan di uji melalui teknik pengukuran

Adapun konsep – konsep yang dipakai dalam penelitian adalah yakni:

1. Pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai peran untuk menjaga dan menjalankan kepentingan kemudian yang disebut pemerintah adalah proses menjalankan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat selaku perangkat daerah kabupaten / kota
3. Kebijakan public merupakan apa yang di pilih oleh pemerintah untuk di kerjakan
4. Pelaksanaan kebijakan adalah menjalankan sebuah peraturan yang di buatnya
5. Komunikasi adalah keberhasilan terhadap pelaksanaan peraturan masyarakat agar pelaksana mengetahui apa yang harus di lakukan.
6. Sumber daya adalah walaupun isi kebijakan sudah di komunikasi secara jelas dan konsinten, apabila implemantator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implemtasi tidak akan berjalan efektif
7. Disposisi atau sikappara pelaksana adalah watak dan karakteristik yang di miliki oeh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis

8. Struktur birokrasi merupakan hal penting dalam mempengaruhi dalam implementasi program atau kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, norma dan pula hubungan
9. Pengelolaan adalah proses, cara pembuatan mengelola : proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain : proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi : proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tujuan.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain



## E. Operasional Variabel

**Tabel II. 2 Operasional Variabel Impementasi Di kabupaten Bengkalis**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
George C.Edwards III menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap Studi Implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkunga Hldup	Komunikasi	a.Adanya sosialiasi b.Masyarakat tahu akan sangksi	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi
		Sumber Daya	a.Tersedia personil yang cukup b. Tersedianya fasilitas yang mendukung	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi
		Disposisi	a. Adanya pemahaman atau konsistensi yang sama tentang isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan b.Adanya itikad baik dari masyarakat dan tanggung jawab masyarakat untuk mentaati aturan	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Birokrasi	a. Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi terkait b. Adanya koordinasi antar pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan	Terimplementasi Cukup terimplementasi Kurang terimplemtasi



## F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini, teknik pengukuran yang dilakukan dengan pengukuran Skala Likert. Dimana Skala Likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017; 92), variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Peneliti membedakan ke dalam tiga kategori penilaian yaitu : sangat setuju (3), setuju (2), dan kurang setuju (1), setiap pertanyaan yang dibuat per indikator variabel, masing-masing jawabannya terdiri dari 3 kategori dengan nilai skor antara lain :

<b>Option</b>	<b>Bobot</b>
Sangat Setuju	3
Setuju	2
Kurang Setuju	1

Untuk melihat hasil Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup dan Penataan hukum Lingkungan hidup maka dibuat kan pengukuran variabel sebagai berikut :

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada masing-masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori terimplemtasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplemtasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplemtasi berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori komunikasi terimplementasi berada pada masing-masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori komunikasi terimplemtasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplemtasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori kumunikasi terimplemtasi berada pada rentang persentase 0%-33%

#### 2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori sumber daya terimplementasi berada pada masing-masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori sumber daya terimplemtasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplemtasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori sumber daya terimplemtasi berada pada pada rentang persentase 0%-33%

### 3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori Disposisi terimplementasi berada pada masing-masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori disposisi terimplemtasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplemtasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori disposisi terimplemtasi berada pada pada rentang persentase 0%-33%

### 4. Birokrasi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategorii birokrasi terimplementasi berada pada masing-masing persentasi 67% -100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori birolrasi terimplemtasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplemtasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori birokrasi terimplemtasi berada pada pada rentang persentase 0%-33%



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan metode Kuantitatif dengan Teknik Analisis Deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variabel yang ada pada Objek Penelitian ini

Dengan Demikian, Peneliti ingin menggambarkan, meringkas sebagai keadaan dan situasi diperoleh suatu kesimpulan yang jelas terkait dengan penelitian yang dimaksud

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis tertarik untuk menjadikan kecamatan bantan kabupaten Bengkalis sebagai lokasi penelitian karena pada hakikatnya pesisir kecamatan bantan ini berperan penting buat masyarakat karena pesisir pantai yang terjaga ekosistemnya akan bermanfaat bagi masyarakat setempat sebagai tempat mata pencaharian, jika pesisir pantai ekosistemnya rusak seperti kerusakan hutan bakau yang ada maka dapat menimbulkan bencana abrasi, abrasi yang terjadi karena air laut jika pemerintah kabupaten bengkalis tidak cepat tanggap dalam menanggulangi masalah tersebut maka akan terjadi bencana yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan. selain itu alasan penulis menemukan fenomena yang menarik untuk di teliti dan lokasi penelitian yang dapat di jangkau oleh penulis untuk menghemat sumber daya.

### C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai sifat tertentu yang di tetapkan penulis untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono, 2011;80) sedangkan Menurut Sugiyono (2011: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada,sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang di dasarkan oleh pertimbangan pertimbangan yang ada.

Dengan demikian dapat diketahui yang menjadi populasi adalah Pemerintah Kecamatan,Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kecamatan Bantan.

**Tabel III.I : Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala dinas Lingkungan Hidup	1	1	100 %
2	Kepala Bagian Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	1	100 %
3	Seksi Pemantauan Lingkungan	1	1	100 %
4	Seksi Pencemaran Lingkungan	1	1	100%
5	Seksi Kerusakan Lingkungan	1	1	100%
6	Masyarakat pengelola Hutan mangrove	72	42	Rumus Slovin
	Jumlah	77	47	

Dari Tabel Populasi dan sampel di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di antaranya Kepala Dinas

Lingkungan Hidup hingga Seksi kerusakan Lingkungan semuanya di jadikan populasi dan sampel di karenakan jumlah dari responden sedikit dan mudah di jangkau oleh penulis berdasarkan dari menggunakan teknik jenuh sampling, kemudian selain dari Dinas Lingkungan Hidup, penulis juga mengambil masyarakat yang menjadi responden yaitu kelompok masyarakat yang mengelola hutan mangrove di kecamatan bantan.

#### **D. Teknik penarikan sampel**

Dalam penelitian ini, untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, kepala bagian yang mengatur tentang pengendalian kerusakan lingkungan Hidup yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel secara keseluruhan, sedangkan kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel karena ada pertimbangan, adapun cara penarikan sampel berdasarkan rumus yakni :

$$n = \frac{n}{1 + n(\text{moe})^2}$$

$$n = \frac{72}{1 + 72(0.1)^2}$$

$$n = \frac{72}{1.72}$$

$$n = 41.8 = 42$$

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, sumber data yang di gunakan yaitu :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan suatu sumber daya di peroleh langsung dari narasumber melalui wawancara, dan pemantauan. Untuk melihat tanggapan terkait dengan masalah yang sedang di teliti oleh penulis.

### **2. Data Sekunder**

adalah hasil yang di peroleh dengan cara membaca laporan-laporan atau dokumen , peraturan-peraturan, dan buku – buku yang tersedia di dinas lingkungan hidup kabupaten bengkalis

## **F. Teknik Pengumpulan data**

adalah cara mengumpulkan informasi tentang variable-variabel yang akan di teliti dalam penulis antara lain:

1. **Quisioner**, Adalah cara pengumpulan data dengan menyerahkan beberapa pertanyaan untuk di isi oleh responden, beberapa daftar pertanyaan tertulis dengan perimbangan bahwa responden adalah subjek yang dianggap tahun tentang objek peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bengkalis.
2. **Wawancara**, digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat dengan bertanya langsung kepada narasumber.
3. **Observasi**, digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala – gejala yang akan di teliti

4. Dokumentasi, dipakai untuk melihat lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara memfoto beberapa objek yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **G. Teknik Analisa Data**

semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya di kelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk table, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu yang telah di uraikan berdasarkan fakta dilapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang di dasarkan tata cara ilmiah.



## **I. Rencana Sistematika laporan Penelitian**

Penyusunan Laporan ini dapat di kemukakan berdasarkan sistematika Penelitian antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini berisikan penguraian dari pengertian, definisi konsep dan teori-teori yang menyangkut daftar pustaka. Di lanjutkan dengan kerangka piker, konsep operasional dan operasional variable pengukuran variable.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menjelaskan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai situasi dan kondisi umum tentang wilayah penelitian yang berlangsung

### **BAB V HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Dasar Aturan yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan di berikan saran atas temuan tersebut



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis**

##### **1. Keadaan Geografis Kabupaten Bengkalis**

Bengkalis adalah Kabupaten Di Provinsi Riau, dengan ibu kota terletak di pulau Bengkalis, dari zaman dahulu di ketahui mempunyai kekayaan sumber daya alam yang baik sektor migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian ,peternakan dan pariwisata. Disamping kaya akan potensi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten bengkalis memiliki letak yang strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).

setelah terjadi perluasan Daerah, Kabupaten ini semula jumlah penduduknya merupakan penduduk terbanyak di provinsi Riau yaitu 1.182.267 jiwa namun setelah permekaran terjadi 545.737 jiwa dengan luas wilayah yang sejumlahnya 30.646,83 Km<sup>2</sup> menjadi 7.773.93 Km<sup>2</sup> . Utara yang wilayahnya berada pada posisi 2030'LU-0017LU dan 100052'BT-102010'BT,

Bengkalis sangat di pengaruhi oleh iklim laut, dengan temperatur berkisaran 26°C – 32°C. Musim Hujan biasa terjadi antara bulan september hingga januari, dengan curah hujan biasa berkisaran antara 809-4.078 mm/tahun. Sedangkan periode Kering (Musim Kering) biasanya terjadi antara bulan Febuari hingga

Agustus. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten bengkalis, Kabupaten Bengkalis terbagi atas 11 Kecamatan

## **2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis Merupakan kota Berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mangadu nasib di kabupaten Bengkalis , Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap bengkalis, sering semakin banyaknya warga pendatang untuk mencakup di kabupaten Bengkalis, pemerintah Kabupaten bengkalis harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan di mulai dari pendapatan warga,penataan rumah penduduk, penyedia lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya, sehingga kesejahteraan penduduk Kabupaten Bengkalis tetap terjamin.

Sebagian besar peduduk yang mendalami wilayah Kabupaten Bengkalis adalah suku melayu, Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pematang ke daerah ini seperti suku jawa,batak,minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

### **B. Profil Kecamatan Bantan**

#### **a. Geografis**

Bantan Merupakan satu dari 11 kecamatan yang berada di pulau bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah :

1. Bagian utara berbatasan dengan selat malaka
2. Bagian selatan berbatasan dengan kecamatan bengkalis
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan kecamatan Bengkalis dan selat malaka

#### 4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat malaka

Sesuai informasi dari Camat Bantan, Luas Wilayah Kecamatan Bantan adalah 424 Km<sup>2</sup>, dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan Luas 114 Km<sup>2</sup> atau 26.89% dari luas keseluruhan kecamatan bantan , Diikuti oleh Selat Baru 63 km<sup>2</sup> (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km<sup>2</sup>. Desa dengan lurus terjauh dari ibukota kecamatan bantan adalah Teluk Lancar dengan jarak 37 km<sup>2</sup>. Dan jarak terdekat adalah Selat Baru sebagai Ibukota Kecamatan Bantan.

**Tabel IV.1 jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantan**

NO	Desa/Kelurahan	RT/RW	LK	PR	Jumlah	Jumlah kk
1	Bantan Tengah	32/15	1.699	1.644	3.343	1.012
2	Bantan Air	26/12	1.109	1.030	2.139	689
3	Bantan Tua	15/6	1.400	1.329	2.729	761
4	Teluk Pambang	18/6	654	673	1.327	475
5	Selat baru	36/15	2.195	2.032	4.227	1.258
6	Teluk Lancar	23/4	1.060	983	2.043	572
7	Kembung Luar	21/8	1.205	1.088	2.293	670
8	Jangkang	16/8	1.265	1.112	2.377	670
9	Muntai	16/6	984	870	1.854	542
10	Resam Lapis	17/7	792	791	1.583	463
11	Berancah	35/13	1.475	1.343	2.818	788
12	Ulu Pulau	22/10	881	791	1.677	490
13	Menyatan	16/6	581	539	1.120	348
14	Pambang Pesisir	25/6	696	686	1.382	377
15	Sukamaju	39/10	1.140	1.031	2.171	572
16	Pambang Baru	16/6	792	707	1.499	444
17	Kembung Baru	22/7	945	875	1.820	468
18	Pasiran	19/6	637	605	1.242	339
19	Bantan Sari	15/6	577	555	1.132	300
20	Bantan Timur	20/8	807	722	1.529	418
21	Teluk Pepal	25/11	1.129	981	2.110	591
22	Muntai Barat	19/5	438	406	844	238
23	Deluk	15/7	693	611	1.304	349
	<b>Jumlah</b>	<b>508/188</b>	<b>23.154</b>	<b>21.409</b>	<b>44.563</b>	<b>12.834</b>

Sumber : Kantor Camat Bantan

b. Pemerintahan

Terdapat 9 desa yang ada di bantan, yaitu desa Teluk Lancar, Kembang Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan air, Bantan tengah, Selat baru, Bantan Tua dan jangkang. desa tersebut adalah desa swakarya hingga akhir tahun 2009, terdapat 85 RW dan 299 RT di Kecamatan Bantan, Dengan Jumlah RW terbanyak berada di Desa Selat Baru dan Jumlah Rt terbanyak di Desa Teluk Pambang

c. Ekonomi

Sesuai data dari UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat, 43 Industri kecil dan, 422 Industri Mikro, jumlah usaha perdagangan yang terdaftar paling banyak terdapat di Desa Selat baru ini semua dikarenakan Desa tersebut adalah Ibu kota Kecamatan. Jumlah Koperasi yang terdaftar di kecamatan Bantan adalah 5 KUD dan 44 Non- KUD.

**C. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
  - a. Sub bagian Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan limbah B3, terdiri dari :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
  - b. Seksi Penanganan Sampah
  - c. Seksi B3 dan Limbah B3
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
  - b. Seksi Pencemaran Lingkungan
  - c. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Pengandan dan Penegakan Hukum Lingkungan
  - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber daya alam
7. Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kepala Dins Lingkungan Hidup

Tugasnya : menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.

2. Sekretariat

Tugasnya : Menyelenggarakan kerjasama sesuai dengan kewenangannya dan menjalankan tugas lainnya dari atasan.

Fungsinya :

- a. menjalankan operasional pelayanan administrasi kesekretariatan;
- b. kerjasama dalam penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengelolaan sistem penyampaian informasi Lingkungan Hidup Tingkat Daerah;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
- f. Penginventarisasikan permasalahan menjadi bahan telaah dan petunjuk pemecah masalah;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja/kelembagaan di bidang tugasnya;
- h. Pemberian sarana dengan bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap bawahan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

k. Koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu;

Susunan Organisasi sekretariat,antara lain:

- a. bidang Program
- b. bidang Umum dan Kepegawaian
- c. bidang Keuangan

**3. Bagian Tata Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Tugasnya : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan serta pembagian tugas lain dari kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. merancang Kebijakan teknis bagian tata lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencipta rencana tindak kerusakan terhadap lingkungan hidup.
- b. Inventarisasi dan evaluasi RPPLH;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi RPPLH;
- d. Koordinasi dan penentuan kekuatan dan wadah lingkungan hidup
- e. merancang ekomoni Lingkungan Hidup(PDB dan PDRB Hijau, mekanisme isentif disinsentif,pendanaan Lingkungan Hidup;
- f. Penyusunan NSDA dan SLHD serta indeks kualitas Lingkungan Hidup
- g. Penyusunan dan perbaikan KLHS
- h. Kerjasama dalam menyusun bagian pencegahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan ( Amdal, UKL-UPL,izin Lingkungan,Audit LH, Analisis resiko LH;
- i. Penilaian ,pemeriksaan dan atau verifikasi DokumenLingkungan Hidup (AMDAL,dan UKL-UPL dan SPPL) dan proses izin Lingkungan.
- j. Penyusunan kebijakan,identifikasi,verifikasi, dan validasi serta penetapan pengekuatan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- l. Penyusunan data dan informasi

- m. Penyusunan kebijakan penguatan kemampuan, penyelenggaraan diklat dan pendampingan terhadap MHA, Kearifan atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- n. Menyusun model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- o. peningkatan dan pelaksanaan diklat an penyuluhan LH
- p. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH
- q. penyiapan kebutuhan kebutuhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- r. Pengembangan, penyusunan kebijakan , penilaian dan pemberian penghargaan penghijauan LH.
- s. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan pemberian penghargaan penghijauan LH;
- t. Penyampaian hasil sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Pemberian Tugas dan pengewasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- v. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

Susunan Organisasi bagian tata lingkungan serta peningkatan kapasitas

lingkungan hidup, yaitu :

- a. Seksi Inventarisasi
- b. Seksi pemantauan Dampak Lingkungan;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sumpah B3 dan Limbah B3

4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Tugasnya ; Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah .

5. Bagian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tugasnya : Menyelenggarakan kebijakan pemantauan, pembinaan, pencegahan, dan pemulihan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan hidup serta tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Fungsinya :

- a. Menjalankan peraturan bagian pengendalian pencemaran lingkungan serta kerusakan dalam rangka menghasilkan rencana tindak untuk mengurangi kerusakan
  - b. Pelaksanaan pemantauan lingkungan
  - c. Pemantauan kualitas lingkungan
  - d. merencanakan sarpras pengintaian lingkungan
  - e. pengendalian pencemaran dari sumber pencemaran lembaga maupun non lembaga;
  - f. Pengintaian kualitas sumber pencemaran;
  - g. Melakukan pembaharuan terhadap sistem informasi layanan terkait dengan informasi kerusakan dan dampaknya;
  - h. Penyusunan kebijakan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i. Menjalankan pemberdayaan terhadap lokasi kerusakan
  - j. Pelaksanaan proses perizinan pembuangan limbah cair;
  - k. Ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
  - l. Pelaksanaan pencegahan dan pemantauan karlahut;
  - m. Pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
  - n. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
  - o. Pemantauan dan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon (BPO);
  - p. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan TUPOKSI
  - q. Menjalankan tugas lain dari atas sesuai kewenangan
  - r. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya terdiri dari:
    1. bagian pemantauan lingkungan;
    2. bagian pencemaran Lingkungan;
    3. bagian kerusakan dan pemulihan lingkungan.
6. Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Tugasnya : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, pelayanan pengaduan dan menjalankan peraturan terkait dan melaksanakan kebijakan tersebut hingga pemeliharaan lingkungan Hidup dan koveni sumber daya demi mewujudkan kualitas lingkungan serta tugas-tugasnya yang lain yang di berikan.

Fungsinya :

- a. membuat kebijakan bagian penataan serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk menghasilkann rencana tindak penegakan hukum lingkungan dan pengawasan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Membuat peraturan terkait pengaduan;
- c. Pelaksanaan pelayanan, verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup;
- d. Menjalankan pembinaan terkait hasil tindak lanjut pengaduan;
- e. Menuntaskan permasalahan lingkungan ;
- f. penyuluhan dan meningkatkan sistem informasi penerimaan pengeduan masyarakat atas usaha dan kegiatan yang sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. merancang peraturan terhadap petugas pengawas lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Pembinaan monitoring pelaporan pelaksanaan izin lingkungan;
- i. pemberdayaan terhadap petugas pengawsan lingkungan hidup daerah;
- j. membuat tim kerja sama dan pelaksanaan proses peningkatan hukum atas pelanggaran perlindungan dan lingkungan hidup;
- k. menjalankan perlindungan,pengawetan,pemanfaatan serta perlindungan sumber daya alam
- l. melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- m. Pelaksanan inventarisaasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- n. membuat dan penetapan peraturan dan pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati;
- o. melihat dan menjaga konservasi keanekaragaman hayati;
- p. menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- q. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- r. Menyampaikan saran sesuai bagian tugasnya;
- s. Memberikan saran dan pengewasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Susunan organisasi bagian penataan dan pemeliharaan lingkungan Hidup terdiri dari;

1. bagian pelayanan pengaduan dan penegakan hukum Lingkungan
2. bagian pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
3. bagian pemeliharaan lingkungan hidup serta konsevasi sumber daya alam

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang terkait dengan dasar aturan yang dijelaskan oleh peneliti dalam mengumpulkan data – data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kusioner penelitian yang di awali dengan identitas responden. Hal ini mempunyai tugas dan tujuan untuk lebih mengetahui tingkatan dari populasi yang di jadikan responden dalam melakukan penelitian.

Namun sebelum memiliki hasil dari penelitian penulis ingin menjelaskan terlebih dahulun identitas responden yang di anggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan sebgai berikut.

##### 1. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan di yakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk pekerjaan dan di yakini berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berfikir dan tingkat wawasan yang di miliki oleh seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat memberikan penjelasan identitas responden tingkat pendidikan akhir.dibawah ini adalah Penjelasan lebih lanjut terkait responden yaitu :

**Tabel V.1 : Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	17	48%
4	D.III	7	19%
5	S.1	12	33%
6	S.2	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>100%</b>

berdasarkan data yang berhasil di peroleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Khususnya staf pegawai pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bahwa dari 30 orang yang dijadikan responden, sebanyak 17 orang untuk lulusan SMA , 1 orang untuk lulusan D.III dan 12 orang untuk lulusan Strata satu.

## 2. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin untuk menilai permasalahan yang di angkat oleh penulis ,dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.2 : Distribusi Menurut Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	21 Orang	70%
2	Perempuan	9 Orang	30%
<b>Jumlah</b>		<b>30 orang</b>	<b>100%</b>

dapat di ketahui bahwa jenis kelamin responden pegawai Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan tanggapan terhadap penanggulangan kerusakan hutan mangrove, dimana laki-laki sebanyak 21 orang atau 70% responden dan 9 orang perempuan atau 30 % responden untuk menilai permasalahan yang di angkat oleh penulis

### 3. Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur

**Tabel V.3 : Distribusi Menurut Usia**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	22 orang	74 %
2	31-40	8 orang	26 %
3	41-50	-	-
4	>50	-	-
	Jumlah	30 orang	100 %

Dilihat dari Tabel V.IV diatas, dalam pengumpulan data identitas responden dari unsur pemerintahan pada kantor Dinas Lingkungan hidup Di Kabupaten Bengkalis di bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan tingkat usia, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur atau usia responden berada pada tingkat usia 20-30 tahun berjumlah sebanyak 22 responden dengan persentase 74 %

#### **B. Implementasi Peraturan Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkalis.**

adanya pembentukan pemerintah daerah tidak terlepas dari diberikannya otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangga daerah masing-masing. Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya untuk mempelancar pembangunan tiap-tiap daerah. Tujuan pokok pemerintah daerah di era otonomi daerah ini, terjadi perbedaan konsep tentang peranan pemerintah terhadap rakyat : pertama, ada yang berpendapat bahwa pemerintah harus mengurangi keikutsertaan dalam mengatur sebanyak mungkin segi dari kehidupan masyarakat ,karena hanya

dengan cara itu, keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kemajuan akan dapat di capai. kemudian di lihat jawaban dari responden mengenai Permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait dengan pelaksanaan program yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

1. Komunikasi

Efektif atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan, salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi, baik itu antara sesama aparatur pemerintah, maupun antara Aparat Pemerintah dengan Masyarakat:

**Tabel V.4 Distribusi Jawaban responden terhadap indikator komunikasi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1	Sosialisasi terkait dengan Dasar aturan yang digunakan	18	23	6	47
2	Sosialisasi tentang lingkungan hidup terkait dengan kerusakan hutan mangrove	17	24	6	47

Sumber : *Olahan Penelitian 2018*

Dari tabel V.4 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Komunikasi, Dalam melakukan perencanaan yang di nilai pada item pertama yaitu Sosialisasi terkait dengan Dasar aturan yang digunakan, yaitu sebanyak 18 orang menyatakan Baik, sebanyak 23 orang menyatakan Cukup baik dan sebanyak 6 orang yang menyatakan tidak baik. Pada Indikator pertanyaan yang kedua itu sosialisasi terkait dengan kerusakan hutan mangrove dalam pelaksanaannya sebanyak 17 orang yang menyatakan baik dan 24 responden yang mengatakan kurang baik dan 6 orang mengatakan tidak baik

**Tabel V.5 Analisis Distribusi jawaban responden terhadap indikator komunikasi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1	Sosialisasi terkait dengan Dasar Aturan yang digunakan	54	46	6	106
2	Sosialisasi tentang lingkungan hidup terkait dengan kerusakan hutan mangrove	51	48	6	105
Total Skor					211
Skor Tertinggi = $47 \times 3 = 141$ 2 Indikator = $141 \times 2 = 282$ Persentase Jawaban Responden = $\frac{211}{282} \times 100\% = 75\%$					

Sumber : Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui mengenai indikator komunikasi dalam pelaksanaan peraturan yang diteliti oleh penulis terbanyak responden menyatakan dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 75% dari jumlah responden. Hal ini dinyatakan dengan alasan bahwa aparat pemerintah telah mensosialisasikan kepada masyarakat pengelola hutan mangrove terkait dengan Dasar Aturan yang Digunakan ini dan sebagian kelompok masyarakat telah mengetahui akan peraturan daerah tersebut tetapi ada juga masyarakat yang belum mengerti secara baik terkait dengan dasar aturan tersebut ini dengan alasan ada beberapa masyarakat yang tidak hadir dalam proses sosialisasi tersebut.

Sedangkan keterangan lain mengenai indikator komunikasi, sesuai dengan hasil wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah melakukan sosialisasi maupun melalui pembinaan

secara langsung terhadap masyarakat pengelola hutan mangrove agar dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang ada di kecamatan

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap bapak Arman sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

*“Bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup di kabupaten bengkalis telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini dilakukan pada saat kami melakukan sosialisasi terkait program yang kami jalankan yaitu program pengelolaa hutan mangrove kepada masyarakat tersebut dilapangan.kami juga telah menerangkan apa isi dari Peraturan Daerah tersebut serta menjelaskan sanksi yang diterima jika melanggarnya”*

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah peraturan daerah. Dalam hal ini, sumber Daya yang membantu keberhasilan implementasi perda tersebut di atas berupa jumlah aparat pelaksana pengelolaan lingkungan hidup,sarana berupa tempat dan pembinaan terhadap pengelola sebagai solusi pengelolaan.

**Tabel V.6 Distribusi Jawaban responden tentang indikator Sumberdaya**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1	Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup sudah melibatkan seluruh aparat terkait	37	7	3	47
2	Pelaksanaan Program Pengelolaan hutan mangrove sudah di dukung oleh sarana yang memadai	11	31	5	47

## Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.6 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Sumber Daya, Dalam pelaksanaannya pada item pertanyaan yang pertama yaitu pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove sudah melibatkan seluruh aparat terkait, yaitu sebanyak 37 orang menyatakan Baik, sebanyak 7 orang menyatakan Cukup baik dan sebanyak 3 orang yang menyatakan tidak baik.

Pada Indikator pertanyaan yang kedua mengenai dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove sudah di dukung oleh sarana yang memadai ,yaitu sebanyak 11 orang menyatakan baik, 31 orang menyatakan cukup baik dan 5 menyatakan kurang baik

**Tabel V.7 Analisis Distribusi Jawaban responden tentang indikator Sumberdaya**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1	Pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove sudah melibatkan seluru aparat terkait	111	14	3	128
2	Pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove sudah di dukung oleh sarana yang memadai	33	62	5	100
Total Skor					228
Skor Tertinggi = $47 \times 3 = 141$ 2 Indikator = $141 \times 2 = 282$ Persentase Jawaban Responden = $\frac{228}{282} \times 100\% = 81\%$					

Sumber Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui mengenai indikator sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang diteliti ,terbanyak menyatakan baik

yaitu sebanyak 81 % hal ini menyatakan bahwa terkait dengan indikator sumber daya ini aparat pemerintah sudah melibatkan seluruh aparat terkait dalam menjalankan program pengelolaan hutan mangrove dan dari pihak masyarakat juga mengatakan aparat pemerintah juga sudah secara maksimal melibatkan seluruh aparat terkait dalam menjalankan program ini namun dalam hal ini masih juga terdapat kekurangan yaitu terkait dengan sarana. Sedangkan keterangan lain mengenai Peraturan Daerah ini, sesuai dengan wawancara terhadap Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu yang menjalankan program pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

*“Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan hutan mangrove memang sudah melibatkan seluruh aparat terkait dengan pelaksanaan memang saja ada beberapa kekurangan terkait dengan sarana dalam pelaksanaan program ini tetapi kami sudah mengantisipasi masalah ini sehingga dalam pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar sesuai prosedur”*

Berdasarkan Hasil Observasi dapat diketahui dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan mangrove yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini seluruh aparat terkait sudah terlibat sehingga pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan baik.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang berkaitan terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan

Dalam Implementasi peraturan harus memperhatikan sikap agar terhindar dari kesimpangsiuran di tengah masyarakat, untuk lebih jelas kita lihat jawaban responden mengenai Disposisi pada tabel berikut ini :

**Tabel V.8 Distribusi jawaban responden terhadap indikator Disposisi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Sudah ada pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat pengelola hutan mangrove	35	6	6	47
2	Pengawasan yang dilakukan terhadap program yang dijalankan sudah dilakukan secara rutin	9	35	3	47

Sumber : *Olahan Penelitian 2018*

Dari tabel V.8 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Disposisi dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, Dalam pelaksanaannya pada item pertanyaan yang pertama yaitu sudah adakah pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat pengelola hutan mangrove, yaitu sebanyak 35 orang menyatakan Baik, sebanyak 6 orang menyatakan Cukup baik dan sebanyak 6 orang yang menyatakan tidak baik.

Pada Indikator pertanyaan yang kedua mengenai Pengawasan yang dilakukan terhadap program yang dijalankan sudah dilakukan secara rutin, yaitu sebanyak 9 orang menyatakan baik, 35 orang menyatakan cukup baik dan 3 menyatakan kurang baik.

**Tabel V.9 Analisis Distribusi Jawaban responden tentang indikator Disposisi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1	Sudah ada pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat pengelola hutan mangrove	105	12	6	123
2	Pengawasan yang dilakukan terhadap program yang dijalankan sudah dilakukan secara rutin	27	70	3	100
Total Skor					223
Skor Tertinggi = $47 \times 3 = 141$ 2 Indikator = $141 \times 2 = 282$ Persentase Jawaban Responden = $\frac{223}{282} \times 100\% = 79\%$					

Sumber Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan Hasil tanggapan responden diatas dapat diketahui mengenai indikator Disposisi yaitu dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 79% berarti dapat dilihat data tabel V.8 di atas diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan kerusakan hutan mangrove sudah sesuai ketentuan yang dibuat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat pengelola hutan mangrove juga dinilai baik karena berdasarkan jawaban responden mengatakan sudah dilakukannya pembinaan terhadap masyarakat pengelola hutan mangrove ini. Selanjutnya point kedua terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap program ini apakah sudah dijalankan secara rutin sesuai dengan hasil jawaban responden ,terkait dengan dilakukannya pengawasan secara rutin responden mengatakan sebagian Cukup Baik tanggapan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yang mengatakan dalam tahap ini pengawasan sudah dilakukan secara maksimal dan rutin setiap hari sesuai dengan hari kerja dan ada beberapa desa yang belum

dilakukannya pengawasan secara rutin dikarenakan beberapa lokasi pengelolaan Hutan mangrove mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh.

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis kepada Bapak Arman selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

*“Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan program ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terkait dengan pembinaan ini dalam pelaksanaan program yang dijalankan dan didalamnya sudah ada beberapa tahapan dalam program ini salah satunya ya pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove, terkait dengan pengawasan juga sudah dijalankan tetapi mungkin masih terdapat kekurangan dari pengawasan ini di karenakan jarak tempuh dari lokasi pelaksanaan program ini”*

Berdasarkan hasil Observasi diketahui bahwa dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan didalamnya juga terdapat pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove walaupun pengawasan terhadap program yang dijalankan kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam Implementasi adalah suatu tindakan dan sejauh mana keterlibatan Pemerintah dalam Implementasi atau melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Berikut tanggapan responden (Aparat Pemerintah) mengenai indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut yakni :

**Tabel V.10 Distribusi jawaban responden mengenai indikator Struktur Birokrasi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Pelaksanaan penggulangan kerusakan Hutan mangrove sudah ada pembagian tugas yang jelas antara pihak atau aparat terkait	6	6	30	47
2	Aparat terkait bertanggung jawab sudah bekerja secara efektif	7	29	6	47

Sumber : *Olahan Penelitian 2018*

Dari tabel V.10 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Struktur Birokrasi, Dalam pelaksanaannya pada item pertanyaan yang pertama yaitu pelaksanaan penanggulangan kerusakan hutan mangrove sudah ada pembagian tugas yang jelas antara pihak atau aparat yang terkait, yaitu sebanyak 6 orang menyatakan Baik, sebanyak 6 orang menyatakan Cukup baik dan sebanyak 30 orang yang menyatakan tidak baik. Pada Indikator pertanyaan yang kedua mengenai aparat terkait bertanggung jawab sudah bekerja secara efektif ,yaitu sebanyak 7 orang menyatakan baik, 29 orang menyatakan cukup baik dan 6 menyatakan kurang baik.

**Tabel V.11 Analisis Distribusi Jawaban responden tentang indikator Struktur Birokrasi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1	Pelaksanaan penggulangan kerusakan Hutan mangrove sudah ada pembagian tugas yang jelas antara pihak atau aparat terkait	18	12	30	60
2	Aparat terkait bertanggung jawab sudah bekerja secara efektif	21	58	6	85
Total Skor					145
Skor Tertinggi = $47 \times 3 = 141$ 2 Indikator = $141 \times 2 = 282$ Persentase Jawaban Responden = $\frac{145}{282} \times 100\% = 51\%$					

Berdasarkan hasil tanggapan responden diatas dapat di ketahui indikator Struktur Birokrasi yaitu masuk kedalam kategori cukup baik yaitu dengan hasil persentase 51%. Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove tidak mengetahui sudah adanya pembagian tugas yang jelas antara pihak atau aparat yang terkait ini di sebabkan karena dalam proses sosialisasi tidak dijelaskan siapa saja atau badan yang bertanggung jawab dalam melakukan penanggulangan kerusakan hutan mangrove hal ini sesuai dengan jawaban responden dalam indikator Struktur Birokrasi pada Point pertama yaitu 30 orang mengatakan tidak baik terkait dengan pembagian tugas yang sudah jelas. Dan juga kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove menilai aparat terkait bertanggung jawab belum efektif dalam implementasi kebijakan tersebut masuk kedalam kategori baik dari hasil jawaban responden (kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove ).

hasil wawancara penulis kepada Bapak Arman sebagai kepala Dinas

Lingkungan Hidup pada tanggal 27 November 2018 dikatakan :

*“Terkait dengan pembagian tugas dalam pelaksanaan program ini kami sudah menjalankannya sesuai dengan tupoksi yang ada agar program yang di jalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aparat kami sudah bekerja sesuai tanggung jawab masing masing karena sudah ada tupoksi dari masing masing aparat”*

Selanjutnya dari empat indikator yang telah di uraikan di atas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah yang diteliti oleh penulis ini maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden yang selanjutnya dapat di lihat pada tabel berikut

**Tabel V.12 Rekapitulasi jawaban responden**

No	Indikator Variabel	Rekapitulasi
1	Komunikasi	75%
2	Sumber Daya	81%
3	Disposisi	79%
4	Struktur Birokrasi	51%
Total Persentase		286%
Rata rata Persentase		75%

*Sumber : Olahan Penelitian 2018*

Berdasarkan hasil dari Tabel V.12 bahwa penilaian terhadap jawaban responden terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dapat dikategorikan baik karena dapat di lihat dari tabel di atas jawaban responden berada pada persentase 75% dengan kategori baik sesuai dengan Range Kategori Penilaian antara 67%-100%.

**C. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkalis.**

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di lapangan dan Hasil wawancara bersama kepala Dinas Lingkungan Hidup diketahui beberapa hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan ini ,adapun bentuk hambatan yang di hadapi adalah :

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait terhadap program yang dijalankan, pengawasan disini penulis mengartikan seperti ada pemantauan secara rutin yang dilakukan oleh aparat terkait yang bertujuan untuk memantau perkembangan yang terjadi terhadap program yang sedang dijalankan oleh dinas lingkungan hidup,dan juga pengawasan disini juga akan dapat memudahkan kelompok –kelompok masyarakat pengelola hutan magrove untuk melaporkan perkembangan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kurangnya tindakan lanjutan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan hutan mangrove dan kesannya berhenti. Tindakan-tindakan lanjutan yang dimaksud oleh penulis adalah seperti adanya pendampingan secara intensif , dalam program ini memang sudah ada proses pendampingan tetapi hanya saat program tersebut berlangsung dan ketika program tersebut sudah berjalan pihak pemerintah daerah kabupaten bengkalis melalui dinas lingkungan hidup kurang melakukan kegaitan lanjutan dari program yang telah dijalankan sehingga kelompok-

kelompok pengelola hutan mangrove yang ada di kecamatan bantan ini merasa bingung apa yang akan dilakukan selanjutnya dan disini lah yang di harapkan oleh kelompok – kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove mengharapkan adanya tindakan lanjutan khususnya pendampingan secara intensif sehingga kegiatan kelompok masyarakat tersebut dapat terarah dan teratur dan program yang di jalankan oleh dinas Lingkungan hidup dalam menanggulangi kerusakan hutam mangrove dapat terwujud sebagaimana mestinya.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

dalam melakukan Upaya menanggulangi kerusakan hutan mangrove di kecamatan bantan dapat disimpulkan yakni :

1. Diketahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2014 terkait dengan penanggulangan kerusakan hutan mangrove yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui OPD Dinas Lingkungan masuk dalam kategori terimplementasi, ini dapat dilihat dari jawaban dari responden dari 4 indikator, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. dari beberapa indikator yang dijelaskan terdapat indikator sumberdaya yang paling menonjol karena berkaitan melibatkan seluruh aparat terkait dan juga telah didukung dengan sarana yang memadai.
2. Hambatan-hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kerusakan hutan mangrove di kecamatan bantan ini adalah dikarenakan adanya oknum-oknum yang mengeksploitasi hutan mangrove secara berlebihan, pengalihfungsian hutan mangrove menjadi lahan tambak udang, hal tersebut belum bisa secara maksimal di selesaikan oleh aparat dan kurangnya kegiatan-kegiatan lanjutan dari program yang telah di jalankan oleh dinas lingkungan hidup khususnya pendampingan secara intensif dapat

dilihat kelompok-kelompok masyarakat pengelolaan hutan mangrove Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

## **B. Saran**

Setelah adanya hasil pembahasan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kecamatan Bantan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dari upaya yang telah berhasil untuk menanggulangi kerusakan hutan mangrove yang terjadi di kecamatan bantan seperti melalui sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan pemantauan serta pembinaan kepada masyarakat agar dapat di tingkat lagi dan juga harus di iringi dengan upaya-upaya pendampingan secara intensif dan teratur agar kegiatan kelompok masyarakat pengelola Hutan mangrove dapat terarah dan teratur.
2. Segala sesuatu tindakan yang dapat merusak kelestarian hutan mangrove secara disengaja harus di tindak secara tegas oleh aparat keamanan agar kelestarian hutan mangrove dapat tetap terjaga, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan mangrove secara ilegal terkesan didiamkan oleh pihak pemerintah daerah, dimana kelompok masyarakat merasa tindakan perusakan lingkungan hidup tidak mendapatkan tindakan hukum yang memberi efek jera.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku buku:

- Adisasmita, Raharjo, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta
- Andi Azikin, Syafei, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Andi Azikin, Syafei, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta
- Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen system Informasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Andi Azikin, Syafei, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta
- Dunn, N, William, 2004. Kebijakan Publik, Yogyakarta :Gajah mada Universitas Press
- Ermaya, 2000. Manajemen Pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta, Rajawali.
- Edwards III, Goerge. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C Robert L. Peabody
- Harsoyo, 1997, Manajemen Kinerja, Jakarta: Persada
- Manulung, 2004, Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.
- Musaneff, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Nugroho, Riant, 2004. Kebijakan Publik ( Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), PT, Sinar Grafika, Jakarta
- Ndara, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan*, Jakarta
- Ndara, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan*, Jakarta
- Roestam Sjarief, Robert Jkodoatie, 2010, Pengelolaan Sumber Daya Air, Yogyakarta, Bumi Aksara
- Rasyid, M. Ryass, 1997. Kajian awal birokrasi dan Politik Orde Baru. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Roestam Sjarief, Robert Jkodoatie, 2010, Pengelolaan Sumber Daya Air,

Yogyakarta , Bumi Aksara

Salam, Dharma Setyawan, 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta:  
Penerbit Djambatan

Terry, Goerge, R. dan Rue, Leslie W, 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta :PT  
Bumi Aksara

Prajudi,2005. Administarsi dan Manajement Umum. Jakarta. Ghala Indonesia

**Dokumen :**

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan  
Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan  
lingkungan hidup dan penaaatan hukum lingkungan hidup provinsi riau

